

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 237/PMK.05/2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2011 TENTANG
 MEKANISME PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK
 DITANGGUNG PEMERINTAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
 PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTB P-DTP)

Nomor : (1)

1. Kode Satuan Kerja : (2)
2. Nama Satuan Kerja : (3)
3. Tanggal/No. DIPA : (4)
4. Klasifikasi Anggaran : (5).... /(6).... / (7)..... / (8).... /(9).... /(10)....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (11) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemotongan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :

No	AKUN	Penerima	Uraian	Jumlah	PPH yang dipotong
a	b	c	d	e	f
...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

....(18)....

Nama (19)

NIP (20)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTB P-DTP)

No	Uraian Isian
1	Diisi dengan nomor urut SPTB
2	Diisi dengan kode satuan kerja yang bersangkutan
3	Diisi dengan uraian nama satuan kerja yang bersangkutan
4	Diisi dengan tanggal dan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
5	Diisi dengan Kode Fungsi
6	Diisi dengan Kode Subfungsi
7	Diisi dengan Kode Program
8	Diisi dengan Kode Kegiatan
9	Diisi dengan Kode Output
10	Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun
11	Diisi dengan uraian nama satuan kerja yang bersangkutan
12	Diisi dengan nomor urut
13	Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran
14	Diisi dengan nama penerima uang/rekanan
15	Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak/SPK, berita acara yang diperlukan/dipersyaratkan
16	Diisi dengan nilai bruto
17	Diisi dengan jumlah Rupiah PPh yang dikenakan
18	Diisi tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (dalam hal PPK berhalangan maka ditandatangani oleh KPA)
19	Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen
20	Diisi NIP Pejabat Pembuat Komitmen

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 237/PMK.05/2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 228/PMK.05/2011 TENTANG MEKANISME
 PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS
 PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN/ATAU BUN
 UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXXXXX-XXXX
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN / LEMBAGA : (015) KEUANGAN
 ESELON I : (04) DITJEN PAJAK

KODE LAP : XXXXXX
 TANGGAL : XX/XX/XXXX
 HAL :
 XX
 PROG ID :

WILAYAH /PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : XXXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
	TRANSAKSI KAS					
	Penerimaan Dalam Negeri					
XX	Penerimaan Perpajakan					
XXX	Pendapatan Pajak Dalam Negeri					
XXXX	Pendapatan Pajak Penghasilan					
XXXXX	Pendapatan PPh Non Migas					
XXXXXX	Uraian Mata Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Pendapatan Negara Bukan Pajak					
XX	Pendapatan Sumber Daya Alam					
XXX	Pendapatan Minyak Bumi					
XXXX	Pendapatan Minyak Bumi					
XXXXX	Pendapatan Minyak Bumi					
XXXXXX	Uraian Mata Anggaran					
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan					

	XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XX	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
XXX	Pendapatan Hibah					
XXXX	Pendapatan Hibah					
XXXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri					
XXXXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri					
XXXXXXX	Uraian Mata Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	Jumlah Pendapatan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99.99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 237/PMK.05/2011
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2011 TENTANG
 MEKANISME PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK
 DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KANWIL : XX PROVINSI XXXXXXXX

SISTEM AKUNTANSI KAS UMUM NEGARA
 LAPORAN ARUS KAS TINGKAT KUASA BUN
 PERIODE SAMPAI DENGAN dd-mm-yyyy

Kd Lap : LAKP3B
 Tanggal : dd-mm-yy
 Halaman : xx

KPPN : XXXXXXXX

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS KAS MASUK		
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	999,999,999	999,999,999
Penerimaan Perpajakan	999,999,999	999,999,999
411 Pendapatan Pajak Dalam Negeri	999,999,999	999,999,999
412 Pendapatan Pajak Perdagangan International	999,999,999	999,999,999
Penerimaan Negara Bukan Pajak	999,999,999	999,999,999
421 Penerimaan Sumber Daya Alam	999,999,999	999,999,999
422 Pendapatan Bagian Laba Bumh	999,999,999	999,999,999
423 Pendapatan Pnbp Lainnya	999,999,999	999,999,999
Penerimaan Hibah	999,999,999	999,999,999
431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999,999,999	999,999,999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999,999,999	999,999,999
Belanja Pegawai	999,999,999	999,999,999
511 Bagian Gaji Dan Tunjangan	999,999,999	999,999,999
512 Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus Dan Pegawai Transito	999,999,999	999,999,999
513 Belanja Kontribusi Sosial	999,999,999	999,999,999
Belanja Barang	999,999,999	999,999,999
521 Belanja Barang	999,999,999	999,999,999
522 Belanja Jasa	999,999,999	999,999,999
523 Belanja Pemeliharaan	999,999,999	999,999,999
524 Belanja Perjalanan Dinas	999,999,999	999,999,999
525 Belanja Badan Layanan Umum	999,999,999	999,999,999
526 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masy./Pemda	999,999,999	999,999,999
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	999,999,999	999,999,999
541 Belanja Pembayaran Bunga Utang	999,999,999	999,999,999
542 Belanja Pembayaran Discount Sun Dalam Negeri	999,999,999	999,999,999
543 Belanja Pembayaran Discount Sun Luar Negeri	999,999,999	999,999,999
544 Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption	999,999,999	999,999,999
545 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	999,999,999	999,999,999
546 Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri	999,999,999	999,999,999
547 Belanja Denda	999,999,999	999,999,999
548 Belanja Pembayaran Kewajiban/Utang	999,999,999	999,999,999
Belanja Subsidi	999,999,999	999,999,999
551 Belanja Subsidi Perusahaan Negara	999,999,999	999,999,999
552 Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	999,999,999	999,999,999
Belanja Hibah	999,999,999	999,999,999
561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	999,999,999	999,999,999
562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	999,999,999	999,999,999
563 Hibah Kepada Pemerintah Daerah	999,999,999	999,999,999
Belanja Bantuan Sosial	999,999,999	999,999,999
571 Belanja Bantuan Kompensasi Sosial	999,999,999	999,999,999
572 Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan	999,999,999	999,999,999
573 Belanja Lembaga Sosial Lainnya	999,999,999	999,999,999

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
Belanja Lain-Lain	999,999,999	999,999,999
581 Belanja Lain-lain	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999,999,999	999,999,999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	999,999,999	999,999,999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN		
ARUS KAS MASUK		
PENJUALAN ASET	999,999,999	999,999,999
Penjualan Aset	999,999,999	999,999,999
423 Penjualan Aset Tetap	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999,999,999	999,999,999
ARUS KAS KELUAR		
BELANJA NEGARA	999,999,999	999,999,999
BELANJA MODAL	999,999,999	999,999,999
Belanja Modal Tanah	999,999,999	999,999,999
532 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	999,999,999	999,999,999
533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	999,999,999	999,999,999
534 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	999,999,999	999,999,999
536 Belanja Modal Fisik Lainnya	999,999,999	999,999,999
537 Belanja Modal Badan Layanan Utama	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999,999,999	999,999,999
ARUS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	999,999,999	999,999,999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS KAS MASUK		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	999,999,999	999,999,999
Penerimaan Pembiayaan	999,999,999	999,999,999
711 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	999,999,999	999,999,999
712 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	999,999,999	999,999,999
713 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	999,999,999	999,999,999
714 Penerimaan Dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Dalam Negeri	999,999,999	999,999,999
715 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	999,999,999	999,999,999
716 Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999,999,999	999,999,999
ARUS KAS KELUAR		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	999,999,999	999,999,999
Pengeluaran Pembiayaan	999,999,999	999,999,999
721 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	999,999,999	999,999,999
722 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	999,999,999	999,999,999
723 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadualan Kembali	999,999,999	999,999,999
724 Pernyataan Modal Negara	999,999,999	999,999,999
725 RDI/RPD	999,999,999	999,999,999
726 Dukungan Infrastruktur	999,999,999	999,999,999
727 Investasi Pemerintah	999,999,999	999,999,999
728 Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999,999,999	999,999,999
ARUS BERSIH DAN AKTIVITAS PEMBIAYAAN	999,999,999	999,999,999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
ARUS KAS MASUK		
NON ANGGARAN	999,999,999	999,999,999
Penerimaan Non Anggaran	999,999,999	999,999,999
811 Penerimaan Non Anggaran PFK	999,999,999	999,999,999
812 Penerimaan Wesel Pemerintah	999,999,999	999,999,999
813 Penerimaan Reimbursement Dalam Rangka Prefinancing (PP) dan PFK BUN Lainnya	999,999,999	999,999,999
814 Penerimaan Kiriman Uang	999,999,999	999,999,999
815 Penerimaan Transito	999,999,999	999,999,999
816 Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	999,999,999	999,999,999
817 Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS MASUK	999,999,999	999,999,999

URAIAN	BULAN INI	S.D. BULAN INI
1	2	3
ARUS KAS KELUAR NON ANGGARAN	999,999,999	999,999,999
Pengeluaran Non Anggaran	999,999,999	999,999,999
821 Pengeluaran Non Anggaran PFK	999,999,999	999,999,999
822 Pelunasan Wesel Pemerintah	999,999,999	999,999,999
823 Pembayaran PFK Prefinancing dan PFK BUN Lainnya	999,999,999	999,999,999
824 Pengeluaran Kiriman Uang	999,999,999	999,999,999
825 Pengeluaran Transito	999,999,999	999,999,999
826 Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	999,999,999	999,999,999
827 Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	999,999,999	999,999,999
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	999,999,999	999,999,999
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	999,999,999	999,999,999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	999,999,999	999,999,999
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN	999,999,999	999,999,999
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	999,999,999	999,999,999
SALDO AWAL KAS	999,999,999	999,999,999
SALDO AKHIR KAS	999,999,999	999,999,999
SALDO AKHIR KAS BLU	999,999,999	999,999,999
SALDO KAS LAINNYA DI KL DARI HIBAH	999,999,999	999,999,999
SALDO AKHIR KAS KPPN	999,999,999	999,999,999

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP. 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
ttd,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO